

**JURNAL ILMIAH**  
**PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI KASUS**  
**TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

**MEDI ERWINSEN PURBA**

NPM	: 08 05 09984
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2013**



## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

Disusun oleh :

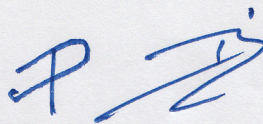
MEDI ERWINSEN PURBA

NPM : 08 05 09984  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal ...6.....1-2014

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M. Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.



**I. Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta.**

**II. Medi Erwinsen Purba, Paulinus Soge.**

**III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

**IV. *Abstract***

*This study was conducted to determine the role of the police in handling criminal cases of motor vehicle theft. Motor vehicle theft is a crime that has a rate that is still high in the city of Yogyakarta. Starting from the description, authors would like to examine further the rule of the police as law enforcement in maintaining security, maintain order, enforce the law, as well as providing protection, guidance, and service to the community by writing laws that entitled the rule of the police in handling criminal cases of motor vehicle theft. The formulation of the issues raised by the author in writing this law is how the rule of the police in handling criminal cases of theft of motor vehicle and any obstacles faced by the police in solving cases of theft of motor vehicle. Legal research is conducted aiming to identify and analyze the roles and constraints faced by the police in dealing with motor vehicle theft in the city of Yogyakarta. role of the police in handling criminal cases of motor vehicle theft appears police efforts made both repressive and preventive.*

Keywords: the rule of police, crime, motor vehicle theft.

**V. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib

suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>1</sup> Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum.

Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya.. Istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/ atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan :

1. Hasilnya sangat menguntungkan
2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, , hlm 38.



3. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain
5. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

#### **B. Tujuan :**

1. Mengetahui dan menganalisis peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### **VI. Pembahasan**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Polisi**

##### **1. Pengertian Tentang Polisi**

Polisi berfungsi untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Tanpa polisi, peraturan hukum pidana hanya akan menjadi rentetan norma tertulis yang mati. Pekerjaan seorang polisi bukanlah pekerjaan normatif, tetapi juga cultural yang kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas. Dalam hal menjalankan tugasnya, polisi tidak dapat hanya berlindung dibelakang ketentuan tugas yang harus dilaksanakannya, melainkan juga diharapkan kepada persoalan tentang bagaimana tugas itu dijalankan.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto; Hartono widodo; Chalimah Syanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm.24

## **2. Tugas Polisi**

Pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 menentukan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **3. Kewenangan Polisi di Bidang Proses Pidana**

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan salah satu cara atau metode dari penyidikan, yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyeleaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Kepemilikan Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib mendaftarkan kendaraan bermotorrnnya terlebih dahulu pada instansi yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Tujuan dari pendaftaran itu adalah untuk inventarisasi data kepemilikan kendaraan bermotor.



Dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki kendaraan bermotor harus dapat membuktikan kepemilikannya dengan BPKB dan STNK. Di dalam BPKB tersebut terdapat keterangan yang terperinci mengenai data-data kepemilikan kendaraan bermotor, data-data fisik kendaraan bermotor dan peruntukkan dari kendaraan bermotor yang bersangkutan.

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Pada umumnya definisi tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berasal dari para ahli hukum pidana. Istilah tindak pidana sampai saat ini sepenuhnya diadopsi dari bahasa Belanda. Hal ini disebabkan karena belum adanya keseragaman pendapat sampai saat ini. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah-istilah tindak pidana dalam perundang-undangan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* :

- a. Tindak Pidana;
- b. Peristiwa Pidana;
- c. Delik yang berasal dari bahasa lain *Delictum*;
- d. Pelanggaran Pidana;
- e. Perbuatan yang dapat dihukum;

## **3. Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor**

Dalam Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan tempat, bila sipelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan sipemilikinya, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsure objektif yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara anisasi. Secara melawan hukum;
- b. Unsur Objektif yaitu barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis kejahatan terhadap kendaraan bermotor, yang dapat dilihat dari rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan-jaringan organisasi. Secara umum kegiatan organisasi dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk pelanggaran hukum yaitu pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil



kejahatan, sedangkan pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan dilaksanakan antar daerah. Sebagaimana diketahui kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh sebab itu kejahatan pencurian terhadap kendaraan bermotor pun merupakan jenis kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi.

Pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan Pasal 362 KUHP saja, tetapi menyangkut kejahatan berbagai Pasal KUHP antara lain:

- a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
- c. Perampasan (Pasal 368 KUHP);
- d. Penipuan (Pasal 378 KUHP);
- e. Penggelapan (Pasal 372 KUHP);
- f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP).

#### **4. Faktor Pendorong terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta**

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas harta benda milik orang/ korban, kejahatan ini merupakan suatu tindakan yang meresahkan masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindakan kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, hal ini disebabkan karena tindakan ini sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang lama. Tindakan

kejahatan ini biasanya dilakukan di kawasan parkir pertokoan, rumah makan, kampus, perumahan, kost serta tempat-tempat yang mereka merasa ada peluang untuk melangsungkan kejahatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sistem keamanan kendaraan bermotor yang kurang lengkap. Aksi pencurian kendaraan bermotor juga sering dilakukan di tempat yang sepi, gelap yang memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan aksinya dengan leluasa. Pelaku kejahatan merampas kendaraan bermotor dan bahkan menggunakan kekerasan apabila korban melawan.

Rumah-rumah *indekost* yang tidak menyediakan fasilitas keamanan yang memadai juga ikut mendorong terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor. Selain itu faktor kebutuhan ekonomi mahasiswa itu sendiri terkadang juga ikut mendorong terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor.

### **C. Upaya Kepolisian terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor**

#### **1. Perkembangan Pencurian Kendaraan Bermotor**

Kejahatan yang selalu mengalami peningkatan dalam frekuensinya dari tahun ketahun adalah kejahatan pencurian. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara oleh penulis dan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP ( Ajun Komisaris Polisi) Ilyas, “kasus pencurian dengan pemberatan serta kasus pencurian dengan kekerasan selama rentang waktu bulan februari 2013 hingga mei 2013 mengalami peningkatan di wilayah



yuridiksi poltabes Yogyakarta. Pada bulan Februari 2013 terjadi 17 kasus, maret 2013 terjadi 29 kasus, pada april 2013 terjadi 35 kasus, dan mei 2013 terjadi 36 kasus. Untuk mengetahui lebih lanjut maka dapat dilihat pada perbandingan data statistic criminal antara pencurian yang penulis dapatkan dari Polresta Yogyakarta:

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan yang cukup menonjol di wilayah poltabes Yogyakarta. Kejahatan ini terdiri dari berbagai macam rangkaian kegiatan yang didalamnya juga mencakup rangkaian organisasi atau jaringan organisasi. Secara umum kegiatan organisasi dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pelaku, penadah, dan pemalsu surat-surat kendaraan bermotor hasil kejahatan. Sedangkan pemasaran hasil pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan didalam ataupun diluar pulau jawa.

Latar belakang terjadinya pencurian kendaraan bermotor dapat dilihat dari kehidupan pelakunya. Latar belakang penyebab dapat dilihat secara kriminologis sedangkan latar belakang pendukung dapat dilihat dari fakta lapangan. Latar belakang penyebab dapat dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern sedangkan latar belakang pendukung terdiri dari keadaan diluar diri pelaku yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Adapun faktor-faktor intern adalah usia, jenis kelamin, dan keturunan. Menurut hasil wawancara penulis dengan pelaku pencurian kendaraan bermotor diketahui bahwa mayoritas pelaku berusia antara 18-33 tahun. Usia seperti ini merupakan usia muda dimana seorang manusia muda

cenderung memiliki keberanian untuk memenuhi keinginannya dengan cara apapun, hal ini tidak lepas dari kondisi psikologis dan lingkungan sekitarnya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa faktor yang menjadi pendorong banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor tak lepas dari kesejahteraan hidup masyarakat yang meningkat. Dengan demikian angka pencurian kendaraan bermotor terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Poltabes Yogyakarta AKP Ilyas, peningkatan jumlah pencurian kendaraan bermotor tak lepas dari kelengahan pemiliknya. Selain itu pencurian kendaraan bermotor lebih diminati dianggap lebih mudah daripada jenis kejahatan terhadap harta benda lainnya seperti perampokan, penodongan, dan sebagainya.

## **2. Upaya Kepolisian dalam Menangani Pencurian Kendaraan Bermotor**

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan secara preventif maupun represif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan kejahatan pada umumnya. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, mengedepankan peran polri yang disertai dengan partisipasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat.



Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menjadi tanggung jawab bersama semua warga masyarakat. Reaksi ini pada dasarnya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor itu sendiri.

Secara resmi yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah pihak kepolisian. Akan tetapi karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri menjadikan tidak efektifnya usaha tersebut. Lebih jauh lagi Polri tidak mungkin akan mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan. Dalam upaya menanggulangi tindak pencurian kendaraan bermotor pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan ketimbang dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan. Demikian juga upaya penanggulangan secara preventif oleh anggota masyarakat adalah lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan tindakan represifnya.

Dalam hal penanggulangan pencurian kendaraan bermotor secara preventif pihak kepolisian dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Ilyas akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini:

- a. Operasi tertentu;
- b. Razia selektif;
- c. Penjagaan dan operasi;
- d. Patroli kepolisian;

Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain:

- 1) Patroli rutin;
- 2) Patroli selektif;
- 3) Patroli incidental.
- e. Pencegahan pencurian kendaraan bermotor melalui pendekatan situasional. Bentuk kegiatan ini antara lain adalah:
  - 1) Memperkokoh sasaran kejahatan;
  - 2) Memindahkan sasaran kejahatan ke tempat yang lebih aman
- f. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan.
- g. Mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor atau residivis yang ada keterkainnya dengan pencurian kendaraan bermotor.
- h. Bagi residivis kambuhan yang telah secara terang-terangan menganggap pencurian kendaraan bermotor sebagai mata pencaharian, maka akan dilakukan tembak ditempat pada bagian kakinya.

### **3. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Menangani dan Menindak Pencurian Kendaraan Bermotor**

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan kendaraan bermotor miliknya sendiri. Kurangnya sistem keamanan di setiap gedung-gedung, pasar-pasar, pusat keramaian dan tempat ibadah yang menjadi pusat berkumpulnya kendaraan bermotor yang diparkir yang kurang memadai dan hanya mengandalkan seorang tukang parkir di rasa kurang membantu keamanan masyarakat. Selain hal tersebut adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung keamanan seperti kamera CCTV di pusat perbelanjaan atau pusat keramaian yang belum memadai juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu biaya operasional yang terbatas dalam memburu pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ikut memiliki andil dalam menghambat upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

Hambatan diatas akan bermuara kembali pada tanggung jawab pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan pencurian kendaraan bermotor terletak pada pembinaan pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi barang kepunyaannya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh polisi secara represif dan oleh masyarakat, polisi, kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang saling memiliki keterkaitan. Semua entitas tersebut harus berjalan beriringan untuk melakukan upaya

preventif dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah kota Yogyakarta.

## **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

1. Peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Upaya preventif dirasa lebih efektif dibandingkan upaya represif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli kepolisian, dan patroli rutin. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan kehakiman dalam hal penjatuhan pidana.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani pencurian kendaraan bermotor adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan keamanan kendaraan bermotor miliknya, lemahnya sistem keamanan di tempat parkir pusat-pusat keramaian. Selain itu biaya operasional yang terbatas untuk memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor ikut menjadi kendala bagi pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Soekanto Soerjono; Widodo Hartono; Suyanto Chalimah, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988